



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

RENCANA KERJA

RENJA TAHUN 2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

Jl. KH. Syech Nawawi Al Bantani
Palima Serang Banten





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (Kp3b)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima-Serang Telp. (0254) 267099

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

NOMOR : / -Satpol PP/2022

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023, perlu disusun secara optimal sehingga dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan dokumen tersebut pada poin "a" diatas perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor. 182 Tahun 2000 tambahan Lembaran Negara Nomor. 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara No.47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara No. 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023, sebagaimana terlampir
- KEDUA** : Tugas Tim Teknis adalah :
- Menyiapkan dan Mengkompilasi Data dari seluruh Bidang di Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten;
 - Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi Banten;
 - Menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satpol PP Provinsi Banten.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP Provinsi Banten
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Serang
Pada tanggal : 24 Mei 2022



AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.
NIP. 19710805 199101 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pj. Gubernur Banten, sebagai laporan.
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, sebagai laporan.
3. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Banten, sebagai laporan.

Lampiran : Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Banten
Nomor : 903 / 49 - SatpolPP/2022
Tanggal : 24 Mei 2022
Tentang : **Tim Teknis Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja)
Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023.**

**TIM TEKNIS PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
SATPOL PP PROVINSI BANTEN TAHUN 2023**

Penganggungjawab : Kepala Satpol PP Provinsi Banten
Ketua : Sekretaris Satpol PP Provinsi Banten
Sekretaris : Kepala Sub Bagian PEP Satpol PP Provinsi Banten
Anggota : 1. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-
Undangan
2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman
3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan
Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Kepala Sub Bagian Keuangan.



KASATPOL PP,

AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.
NIP. 19710805 199101 1001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023 dapat diselesaikan, Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Tahun 2023 berpedoman pada



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya, Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan Penanganan Bencana Kebakaran di Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Juni 2022

Kasatpol PP Provinsi Banten



AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.
NIP. 19710805 199101 1001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangka Daerah	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 ..	38
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	56
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	59
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	74
BAB V	PENUTUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pagu Anggaran dan Realisasi Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2021	12
Tabel 2.2. Pagu Anggaran dan Realisasi Satpol PP Provinsi Banten Sampai Dengan Semester I Tahun 2022	13
Tabel 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Satpol PP Provinsi Banten	15
Tabel 2.4. Pencapaian IKU Satpol PP Provinsi Banten	27
Tabel 2.5. Pencapaian Pelayanan Kinerja Satpol PP Provinsi Banten .	29
Tabel 2.6. Pemetaan Permasalahan Satpol PP Provinsi Banten	37
Tabel.2.7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
Tabel 2.8. Usulan Program dan Kegiatan dan Pemangku Kepentingan Tahun 2023	51
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026	58
Tabel 3.2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023	61
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Hal tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Renja OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Sesuai amanat tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023. Renja Satpol PP Provinsi Banten merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satpol PP Provinsi Banten, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diamanatkan dalam peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan rencana kerja serta pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif. Substansi dalam Rencana Kerja ini adalah mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, RKPD Pemerintah Provinsi Banten dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 2023-2026. Penyusunan rencana kerja ini juga sejalan dengan salah satu langkah awal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu penyusunan Rencana Kerja OPD.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten telah melaksanakan forum SKPD yang dibahas dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja kab/kota se-Provinsi Banten, Unsur masyarakat dan akademisi untuk dijadikan rekomendasi dalam menyusun program dan kegiatan yang akan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

dilaksanakan pada Tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan kedalam dokumen Renja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Banten untuk tahun mendatang, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya harus mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satpol PP Provinsi Banten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyeleggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8,

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas [Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022] (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
 20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 41 tahun 2002 tentang Pengurusan Hutan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam menentukan skala prioritas program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada tahun anggaran 2023. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan disertai pagu indikatif

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

pada Tahun 2023;

2. Merumuskan program kerja Satpol PP Provinsi Banten dan kerangka pendanaan pada Tahun 2023;

Adapun tujuan Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023
2. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas dan indikasi kegiatan Satpol PP Provinsi Banten pada Tahun 2023;
3. Menjadi acuan dalam perumusan program kerja Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Satpol PP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
5. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Banten.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

Bab ini menyajikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan OPD

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan Kaidah Pelaksanaan atas dokumen Rencana Kerja, Catatan Penting dan Rencana Tindak Lanjut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023.

BAB II

**EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Satpol PP**

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Banten. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut Renja Satpol PP Provinsi Banten pada Tahun 2021 secara keseluruhan pelaksanaan Renja mencapai 93,30%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja program dan kegiatan berjalan optimal dengan tingkat deviasi sebesar 6,70%. Sedangkan pelaksanaan Renja pada Tahun 2022 sampai dengan Semester I sebesar 50,46 % dan kemungkinan masih dapat meningkatkan lagi karena waktu yang tersedia cukup lama dan penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa relative masih besar, sehingga sangat optimis pada akhir tahun 2022 diharapkan keberhasilan pencapaian kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2021 baik secara realisasi keuangan maupun fisik.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD . Renja Satpol PP Provinsi Banten pada dasarnya memuat pengukuran hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Banten selama tahun 2021 dan perkiraan target 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja menjadi sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, lapora, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2021

Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2021, telah selaras dengan target didalam Renstra Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten pada Tahun 2021 sebesar **Rp. 37.187.822.944,-** (Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 32.902.909.494,- atau 88,48% dari pagu
- b. Belanja untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 3.541.808.650,- atau 9,52% dari pagu
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 743.104.800,- atau 2,00% dari pagu

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Realisasi anggaran program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Banten pada tahun 2021 sebesar **Rp. 34.697.892.104,-** (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Rupiah) dengan pencapaian rasio 93,30%. Terdiri dari :

- a. Realisasi belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 30.649.923.204,- dengan rasio 82,42% dari pagu total atau 93,15% dari pagu anggaran program
- b. Realisasi belanja untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 3.355.639.900 dengan rasio 9,02% dari pagu total atau 94,74% dari pagu anggaran program
- c. Realisasi belanja untuk Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 692.329.000 dengan rasio 1,86% dari pagu total atau 93,17 % dari pagu anggaran program

Pencapaian kinerja Satpol PP tahun 2022 dari 3 Program dan 12 kegiatan realisasinya sesuai rencana kerja. Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja dalam mencapai target kegiatan diantaranya kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan dan adanya dorongan dari Kepala Satuan kepada masing-masing PPTK untuk melaksanakan percepatan terhadap pelaksanaan kegiatannya.

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk akhir Desember tahun 2021, capaian kinerja sebesar 93,30 % untuk keuangan dan 100% untuk fisik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya pada akhir Desember Tahun 2021. Secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.1. Pagu Anggaran dan Realisasi Satpol PP Provinsi Banten
Tahun 2021**

No.	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
		Rp.	Rp.	%	%
1	2	3	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	37.187.822.944,00	34.697.892.104,00	93,30	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.902.909.494,00	30.649.923.204,00	93,15	100,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.466.000,00	130.109.500,00	79,11	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.085.873.144,00	18.152.648.028,00	90,38	100,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.080.000,00	36.080.000,00	100,00	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.037.700.000,00	946.967.097,00	91,26	100,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.904.472.000,00	8.859.238.629,00	99,49	100,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.498.580.000,00	1.467.656.600,00	97,94	100,00
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.175.738.350,00	1.057.223.350,00	89,92	100,00
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.541.808.650,00	3.355.639.900,00	94,74	100,00
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.486.595.650,00	2.460.647.900,00	98,96	100,00
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	929.193.000,00	811.983.000,00	87,39	100,00
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	126.020.000,00	83.009.000,00	65,87	100,00
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	743.104.800,00	692.329.000,00	93,17	100,00
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	479.424.800,00	440.459.000,00	91,87	100,00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

2	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	263.680.000,00	251.870.000,00	95,52	100,00
	JUMLAH	37.187.822.944,00	34.697.892.104,00	93,30	

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2022, pagu anggaran Satpol PP Provinsi Banten sebesar Rp. 35.537.925.000,- terurai dalam 3 program dan 12 kegiatan serta 44 Subkegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 17,933,249,012,- dengan capaian kinerja keuangan per Triwulan II sebesar 50,46 %. Dengan capaian kinerja sebesar 50,46 % tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai OPD yang berhasil/memuaskan dalam pencapaian kinerjanya pada Triwulan II/Semester I. Secara lebih rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2. Pagu Anggaran dan Realisasi Satpol PP Provinsi Banten Sampai Dengan Semester I Tahun 2022

No.	Nama Kegiatan/TolakUkur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			(Rp.)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	35.537.925.000,00	17.933.249.012,00	50,46	51,64
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.239.475.000,00	16.672.165.762,00	53,37	66,46
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.466.000,00	74.338.500,00	45,20	47,72
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.726.091.500,00	10.088.186.529,00	60,31	60,32
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.218.000,00	19.109.000,00	35,24	35,24
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.151.018.000,00	411.312.593,00	35,73	37,04
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.949.082.000,00	5.541.599.640,00	50,61	51,11
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.531.672.500,00	525.619.500,00	34,32	34,39

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	662.927.000,00	012.000.000,00	1,81	1,81
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.350.000.000,00	1.036.637.250,00	30,94	30,95
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.125.000.000,00	829.729.000,00	39,05	39,72
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.000.000.000,00	204.142.250,00	20,41	20,51
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	225.000.000,00	2.766.000,00	1,23	1,67
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	948.450.000,00	224.446.000,00	23,66	23,55
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	673.450.000,00	182.850.000,00	28,64	34,07
2	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	275.000.000,00	31.596.000,00	11,,49	13,00
	JUMLAH	35.537.925.000,00	17.933.249.012,00	50,46	50,46

Adapun Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Tabel 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Satpol PP Provinsi Banten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengantahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 20220	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan s.dtahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.5.01.1.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,0	3,0	3,0	3,0	100	3,0	3,0	100
		Capaian kesesuaian dengan Parameter Penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang Akuntabel	13	13	13	13	100	13	13	100
		Keuangan dan Neraca Aset	8	8	8	8	100	8	8	100
		Penyusunan Tindak Lanju Hasil	2	2	2	2	100	2	2	100

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengantahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 20220	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan s.ctahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pemeriksaan (TLHP) Aparat PengawasInstansi Pemerintah(APIP)								
		Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3	3	3	3	100	3	3	100
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu	17	24	16	19	100	17	48	100
		Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3	3	3	3	100	3	3	100
		Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9	9	9	9	100	9	9	100
		Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	12	12	12	12	100	12	12	100
		Penyusunan Renstra	1	1	1	1	100	1	1	100
	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor yang berkualitas	2	2	2	2	100	2	2	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perengkapan dan Peralatan Kantor	2	2	2	2	100	2	2	100
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang sesuai kebutuhan	12	12	12	12	100	12	12	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12	12	12	12	100	12	12	100
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12	12	12	12	100	12	12	100
	Penyediaan Barang dan Jasa	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran yang tepat guna	12	12	12	12	100	12	12	100

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengantahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan s.ctahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perkantoran									
		Operasional kantor Tidak tetap	12	12	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan Barang Habis Pakai	12	12	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan Bahan Cetak	12	12	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12	12	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan Promosidan Publikasi	12	12	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12	12	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan BBM	12	12	12	12	100	12	12	100
		Penyelenggaraan Banten Expo	1	1	1	1	100	1	1	100
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur yang kompeten	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	100	18 Dok	18 Dok	100
		Peningkatan Kompetensi Aparatur	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	3 Dok	100
		Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	100	15 Dok	15 Dok	100
	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah yang tepat sasaran	12	12	12	12	100	12	12	100
		Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12	12	12	12	100	12	12	100
		Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12	12	12	12	100	12	12	100

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengantahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan s.ctahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	Tersedianya Data Pembangunan Sektoral	12	12	12	12	100	12	12	100
		Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	2	2	2	2	100	2	2	100
		Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	2	2	2	2	100	2	2	100
		Pengelolaan Website PD	2	2	2	2	100	2	2	100
		Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	2	2	2	2	100	2	2	100
		Pengelolaan PPID	2	2	2	2	100	2	2	100
		Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	2	2	2	2	100	2	2	100
	Penyediaan Barang, Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Tersedianya Barang, Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	4	4	4	4	100	4	4	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1	1	1	1	100	1	1	100
		Pemeliharaan Saranadan Prasarana Kantor	1	1	1	1	100	1	1	100
		Penyediaan Barang danJasa Perkantoran	1	1	1	1	100	1	1	100
		Koordinasi dan Konsultasi Kedalamdan Keluar Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
	Program Ketentraman dan Ketertiba	Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi	100	100	100	100	100	100	100	100

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengantahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 20220	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan s.ctahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Umum									
	Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkelanjutan	1064 keg	1064 keg	1064 keg	1064 keg	100	1064 keg	1064 keg	100
		Pengamanan AksiUnjuk Rasa								
		Penataan/Penertiban Terpadu Ketentraman Dan Ketertiban Umum diwilayah Provinsi Banten								
		Penataan/Penertiban Wiramarga di wilayah Provinsi Banten								
		Bantuan Pengamanan dan PemeliharaanTrantibum Pemilu/Pilkada Serentak								
		Cipta KondisiPengamanan Trantibum Revitalisasi Kawasan Cagar BudayaBanten Lama								
		Pengamanan, Penataan, penertibandan pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Banten	714	714	714	714	100	714	714	100
	Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan	Terwujudnya Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di LingkunganPemerintahProvinsi Banten yang berkelanjutan dan bersinergi denganinstansi lainnya	930 Keg	930 Keg	930 Keg	930 Keg	100	930 Keg	930 Keg	100

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengantahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 20220	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan s.ctahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemerintah Provinsi Banten									
		Pengamanan Hari Besar Nasional / Hari Besar Keagamaan	34	34	34	34	100	34	34	100
		Pengawasan Pejabat di Tempat Acara	226	226	226	226	100	226	226	100
		Pengamanan Pejabat di Tempat Acara	226	226	226	226	100	226	226	100
		Pengamanan dan Pengawasan Hari Besar Nasional / Hari Besar Keagamaan serta Pejabat di Tempat Acara	444	444	444	444	100	444	444	100
	Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berkelanjutan dan terkoordinasi dengan baik dengan lembaga lainnya	231	231	231	231	100	231	231	100
		Rakornis Kerjasama Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	12	12	12	100	12	12	100
		Patroli Kerjasama Tibum dan Trammas Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota	72	72	72	72	100	72	72	100
		Peningkatan Kerjasama Tibum dan Trammas Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota	147	147	147	147	100	147	147	100
	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Presentase Penegakan Peraturan Perundang- undangan daerah	85%	85%	85%	85%	100	85%	85%	100

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengantahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 20220	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan s.ctahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembinaan penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	Tercapainya Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan PeraturanPerundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan yang berkelanjutan	241 Keg	241 Keg	241 Keg	241 Keg	100	241 Keg	241 Keg	100
		Pengawasan Pelaksanaan Perda Provinsi Banten Terhadap Sektor Sosial Kemasyarakatan	8 keg	8 keg	8 keg	8 keg	100	8 keg	8 keg	100
		Pembinaan dan Pengawasan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	8 keg	8 keg	8 keg	8 keg	100	8 keg	8 keg	100
		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda Provinsi Banten danPerundang-undangan Lainnya dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	73 keg	73 keg	73 keg	73 keg	100	73 keg	73 keg	100
	Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Ekologis	Tercapainya Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan PeraturanPerundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Ekologis yangberkelanjutan	217 KEG	217 KEG	217 KEG	217 KEG	100	217 KEG	217 KEG	100
		Pembinaan Pelaksanaan Perda Provinsi Banten Terhadap Sektor	10	10	10	10	100	10	10	100

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengantahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan s.ctahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Ekologis								
		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap masyarakat dalam Sektor Ekologis	4	4	4	4	100	4	4	100
		Rakor Mengenai Perda Sektor Ekologis	2	2	2	2	100	2	2	100
		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda Provinsi Banten dan Perundang-undangan Lainnya dalam Sektor Ekologis	201	201	201	201	100	201	201	100
	Penegakan dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten	Terlaksananya Operasi Penegakan Perda/Pergub di Wilayah Provinsi Banten yang berkelanjutan	275 keg	275 keg	275 keg	275 keg	100	275 keg	275 keg	100
		Operasi Penegakan Perda/Pergub di Wilayah Provinsi Banten	275	275	275	275	100	275	275	100
	Program Perlindungan Masyarakat	Cakupan perlindungan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100
	Supervisi dan Pendayagunaan Potensi Anggota Satuan Linmas	Tercapainya Supervisi dan Pendayagunaan Potensi Anggota Satuan Linmas yang kompeten	13 keg	13 keg	13 keg	13 keg	100	13 keg	13 keg	100
		Rakor Satlinmas	11	11	11	11	100	11	11	100
		Simulasi PAM Pemilu/Pilkada Serentak se Provinsi Banten	1	1	1	1	100	1	1	100
		Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Anggota Satlinmas	9	9	9	9	100	9	9	100
	Penyelenggaraan Teknis Fungsional	Terlaksananya Penyelenggaraan Teknis Fungsional dan	175 Keg	175 Keg	175 Keg	175 Keg	100	175 Keg	175 Keg	100

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengantahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 20220	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan s.ctahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	danPemantapan TugasAnggota Satpol PP Provinsi Banten	Pemantapan TugasAnggota Satpol PP Provinsi Banten yangberkompeten								
		Pembinaan Fisik danMental Anggota	175	175	175	175	100	175	175	100
	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	Tersedianya Data Pembangunan Sektoral yang terintegrasi dan informativ	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	100	15 Dok	15 Dok	100
		Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	15	15	15	15	100	15	15	100
	Program Penanganan Bencana Kebakaran	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya koordinasi pencegahankebakaran dengan Kabupaten/Kota yang berkelanjutan	30 keg	30 keg	30 keg	30 keg	100	30 keg	30 keg	100
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pencegahan Kebakaran Provinsi Banten	4	4	4	4	100	4	4	100
		Penyebarluasan Informasi Pencegahan Kebakaran	2	2	2	2	100	2	2	100
		Penyebarluasan Informasi Pencegahan Kebakaran	24	24	24	24	100	24	24	100
	Penanggung langan Tanggapp Darurat dan Evakuasi	Meningkatnya koordinasi Penanggulangan Tanggapp Darurat dan Evakuasi dengan Kabupaten/Kota yang Berkelanjutan	21	21	21	21	100	21	21	100

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengantahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 20220	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progra dan Kegiatan s.ctahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Tanggap Darurat Kebakaran di Kawasan StrategisProvinsi Banten	4	4	4	4	100	4	4	100
		SimulasiTanggapDarurat dan Evakuasi Bencana Kebakaran diProvinsi Banten	2	2	2	2	100	2	2	100
		Koordinasi dan PeningkatanTanggapDarurat kebakaran	15	15	15	15	100	15	15	100
	Supervisi Penanganan PascaBencana Kebakaran	Terlaksananya Supervisi Pasca Bencana Kebakaranyang berkelanjutan	36	36	36	36	100	36	36	100
		Koordinasi dan Supervisi Penanganan Pasca Bencana Kebakaran	4	4	4	4	100	4	4	100
		Table Top Simulation(TTS) Penanganan Pasca Kebakaran	2	2	2	2	100	2	2	100
		KoordinasidanPeningkatan Penanganan Pasca Bencana Kebakaran	30	30	30	30	100	30	30	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan Pergub No. 83 Tahun 2016 pasal 56 ayat 2, Satpol PP Provinsi Banten dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 57 ayat 1 menyebutkan tugas pokok Satpol PP adalah membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub bidang kebakaran, serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Selanjutnya Pasal 57 ayat 2 menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur;
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi;
- d. Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara geografis Provinsi Banten memiliki luas wilayah 9.662,92 KM². Secara demografi sampai dengan tahun 2021 Provinsi Banten memiliki penduduk bertempat tinggal tetap sebanyak 12.061.475 juta jiwa (BPS, Banten). jumlah penduduk tersebut belum termasuk

penduduk yang tinggal tidak tetap yang telah berbaur di tengah-tengah masyarakat. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari keberagaman suku, agama, ras dan golongan (SARA).

Secara suku sebagian besar Provinsi Banten dihuni oleh suku Sunda Banten kemudian disusul Jawa, sebagian dari suku di pulau Sumatera. Secara agama penduduk Provinsi Banten sebagian besar beragama Islam kemudian secara berurutan Katholik, Kristen, Budha, dan Hindu. Keberagaman geografi dan demografi yang dimiliki Provinsi Banten berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan golongan (SARA) serta kondisi geografis yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu perlu dikelola sedemikian rupa sehingga tercipta stabilitas wilayah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis dan semakin kompleks dibutuhkan penanganan intensif dari pemerintah.

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sangat berperan dalam mempengaruhi perilaku dan karakteristik bangsa agar arah berkembang sesuai dengan arah dan tujuan negara dan mampu menjawab permasalahan masyarakat. Perkembangan ekonomi mikro di Provinsi Banten relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati Kebijakan /regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Kondisi tersebut diatas sangat memungkinkan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban, terjadinya pelanggaran Perda serta unjuk rasa yang merupakan tugas Satpol PP dalam penanganannya. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Banten, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas. disamping itu, fungsi perlindungan masyarakat saat ini juga menjadi bagian dari tugas Satpol PP dalam penyelenggaraannya. Pemberdayaan Satlinmas merupakan ujung tombak pelaksanaan perlindungan masyarakat, pengamanan, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban dan penanganan bencana di Provinsi Banten.

Tolok ukur kinerja Satpol PP sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP menitikberatkan pada penegakan produk-produk hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan. Hal itu berusaha diwujudkan dengan upaya trmeningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar atau tugas pokok fungsi (tupoksi) secara efektif dan efisiensi dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang baik (good governance).

Kinerja Pelayanan Satpol PP diukur dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kineja Kegiatan (Program) yang merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
------------	--------------------------	--------------------------	---------------	------------------	-------------------

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	80 nilai	80 nilai	Penilaian SAKIP
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah yang Aman dan Kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundangan Undangan Daerah	80 %	80%	Σ Cakupan Pelayanan trabtibumlinmas, penegakkan perdan dan Koordinasi Kebakaran dibagi Jumlah Perda dikali 100

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi Banten termasuk kategori berhasil karena mencapai nilai 80 baik untuk capaian SAKIP maupun Rasio Penegakkan Perda.

Capaian Pelayanan Kinerja Satpol PP yang diukur dari indikator kinerja utama program dan kegiatan pada dapat dilihat pada tabel berikut ini:

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Tabel 2.5 Pencapaian Pelayanan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

No.	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Kepuasan Masyarakat							3,0	3,0			
	Capaian kesesuaian dengan Parameter Penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang Akuntabel			22 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	13 Dok	
	Keuangan dan Neraca Aset			17 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	
	Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)			2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	
	Tersusunnya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu			16 Dok	16 Dok	16 Dok	17 Dok	24 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	
	Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan			3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan			9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Penyusunan LaporanEvaluasidanPengendalian			12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok		
Penyusunan Renstra								1 Dok	1 Dok	1 Dok		
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor yang berkualitas			1 pkt									
Pengadaan Sarana danPrasarana Perengkapan danPeralatan Kantor			2 pkt									
Terlaksananya pemeliharaan Saranadan Prasarana Kantoryang sesuai kebutuhan			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln		
Pemeliharaan KendaraanDinasOperasional			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln		
PemeliharaanSarana dan Prasarana Kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln		
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran yang tepat guna			12 bln									
Operasionalkantor Tidak tetap			12 bln									
PenyediaanBarangHabis Pakai			12 bln									
PenyediaanBahanCetak			12 bln									
Penyediaan Makan dan Minum Kantor			12 bln									
PenyediaanPromosidan Publikasi			12 bln									
Penyediaan OperasionalIasa Kantor			12 bln					12 bln	12 bln	12 bln		
Penyediaan BBM			12 bln					12 bln	12 bln	12 bln		
Penyelenggaraan Banten Expo			12 bln					1 bln	1 bln	1 bln		
Meningkatnya Kapasitas Aparaturyang kompeten			81 org	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok		
Peningkatan Kompetensi Aparatur			81 org	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok		
Fasilitasi Administrasi Kepegawaian			81 org	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok		
Terlaksananya Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah yang tepat sasaran			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln		
Koordinasi dan Konsultasi KeluarDaerah			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln		
Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah			12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln		
Tersedianya DataPembangunan Sektoral			6 Dok					6 Dok	6 Dok	6 Dok		
Penyusunan Profil Kinerja Program			1 Dok					1 Dok	1 Dok	1 Dok		

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Perangkat Daerah												
Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah			1 Dok					1 Dok	1 Dok	1 Dok		
Pengelolaan Website PD			1 Dok					1 Dok	1 Dok	1 Dok		
Penyusunan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial Tematik			1 Dok					1 Dok	1 Dok	1 Dok		
Pengelolaan PPIID			1 Dok					1 Dok	1 Dok	1 Dok		
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat			1 Dok					1 Dok	1 Dok	1 Dok		
Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas				4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor				1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran				1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		
Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah				1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		
Cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Terwujudnya Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkelanjutan			238 Keg	238 Keg	238 Keg	238 Keg	238 Keg	238 Keg	238 Keg	238 Keg		
Pengamanan Aksi Unjuk Rasa												
Penataan/ Penertiban Terpadu Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi Banten												
Penataan/ Penertiban Wiramarga di Wilayah Provinsi Banten												
Bantuan Pengamanan dan Pemeliharaan Trantibum Pemilu/Pilkada Serentak												
Cipta Kondisi Pengamanan Trantibum Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Banten Lama												
Pengamanan, Penataan, penertiban dan pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Banten												
Terwujudnya Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah			148 Keg	148 Keg	148 Keg	148 Keg	148 Keg	148 Keg	148 Keg	148 Keg		

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang berkelanjutan dan bersinergi dengan instansi lainnya												
Pengamanan Hari Besar Nasional / Hari Besar Keagamaan												
Pengawasan Pejabat di Tempat Acara												
Pengamanan Pejabat di Tempat Acara												
Pengamanan dan Pengawasan Hari Besar Nasional / Hari Besar Keagamaan serta Pejabat di Tempat Acara			148 Keg	148 Keg	148 Keg	148 Keg	148 Keg	148 Keg	148 Keg	148 Keg		
Terlaksananya Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berkelanjutan dan terkoordinasi dengan baik dengan lembaga lainnya			49 Keg	49 Keg	49 Keg	49 Keg	49 Keg	49 Keg	49 Keg	49 Keg		
Rakornis Kerjasama Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum												
Patroli Kerjasama Tibum dan Tramas Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota												
Peningkatan Kerjasama Tibum dan Tramas Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota			49 Keg	49 Keg	49 Keg	49 Keg	49 Keg	49 Keg	49 Keg	49 Keg		
Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah			75%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%		
Tercapainya Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan yang berkelanjutan			14 Keg	71 Keg	71 Keg	71 Keg	71 Keg	71 Keg	71 Keg	71 Keg		
Pengawasan Pelaksanaan Perda Provinsi Banten Terhadap Sektor Sosial Kemasyarakatan			6 Keg									
Pembinaan dan Pengawasan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			8 keg									
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda Provinsi Banten dan Perundang-undangan Lainnya dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan				71 Keg	71 keg	71 Keg	71 keg	71 keg	71 keg	71 keg		
Tercapainya Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan			8 keg	67 keg	67 keg	67 keg	67 keg	67 keg	67 keg	67 keg		

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Provinsi Banten Dalam Sektor Ekologis yang berkelanjutan													
Pembinaan Pelaksanaan Perda Provinsi Banten Terhadap Sektor Ekologis			5 Keg										
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap masyarakat dalam Sektor Ekologis			2 Keg										
Rakor Mengenai Perda Sektor Ekologis			1 Keg										
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda Provinsi Banten dan Perundang-undangan Lainnya dalam Sektor Ekologis				67 keg	67 keg	67 keg	67 keg	67 keg	67 keg	67 keg			
Terlaksananya Operasi Penegakan Perda/Pergub di Wilayah Provinsi Banten yang berkelanjutan			40 Keg	65 Krg	65 Krg	65 Krg	65 Krg	65 Krg	65 Krg	65 Krg			
Operasi Penegakan Perda/Pergub di Wilayah Provinsi Banten			40 Keg	65 Krg	65 Krg	65 Krg	65 Krg	65 Krg	65 Krg	65 Krg			
Cakupan perlindungan masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Tercapainya Supervisi dan Pendayagunaan Potensi Anggota Satuan Linmas yang kompeten			2 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg			
Rakor Satlinmas			1 Keg										
Simulasi PAM Pemilu/Pilkada Serentak se Provinsi Banten			1 Keg										
Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Anggota Satlinmas				3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg			
Terlaksananya Penyelenggaraan Teknis Fungsional dan Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP Provinsi Banten yang berkompeten			35 Keg	35 Keg	35 Keg	35 Keg	35 Keg	35 Keg	35 Keg	35 Keg			
Pembinaan Fisik dan Mental Anggota			35 Keg	35 Keg	35 Keg	35 Keg	35 Keg	35 Keg	35 Keg	35 Keg			
Tersedianya Data Pembangunan Sektoral yang terintegrasi dan informative			5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok			
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan			5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok			
Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Meningkatnya koordinasi pencegahan kebakaran dengan Kabupaten/Kota yang			3 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg			

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

	berkelanjutan												
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pencegahan Kebakaran Provinsi Banten		2 Keg										
	Penyebarluasan Informasi Pencegahan Kebakaran		1 Keg										
	Penyebarluasan Informasi Pencegahan Kebakaran			8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg			
	Meningkatnya koordinasi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi dengan Kabupaten/Kota yang Berkelanjutan		3 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg			
	Tanggap Darurat Kebakaran di Kawasan Strategis Provinsi Banten		2 Keg										
	Simulasi Tanggap Darurat dan Evakuasi Bencana Kebakaran di Provinsi Banten		1 Keg										
	Koordinasi dan Peningkatan Tanggap Darurat kebakaran			5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg			
	Terlaksananya Supervisi Pasca Bencana Kebakaran yang berkelanjutan		3 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg			
	Koordinasi dan Supervisi Penanganan Pasca Bencana Kebakaran		2 Keg										
	Table Top Simulation (TTS) Penanganan Pasca Kebakaran		1 Keg										
	Koordinasi dan Peningkatan Penanganan Pasca Bencana Kebakaran		3 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg	10 Keg			

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan, maka capaian penyelenggaraan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih belum optimal.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Provinsi Banten tahun tahun terakhir menunjukkan intensitas yang semakin meningkat, hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang jika dikelola dengan baik. Tantangan yang masih dihadapi Satpol PP Provinsi Banten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Dukungan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
2. Belum maksimalnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
3. Belum Optimalnya Kerjasama dan Koordinasi dengan Aparat/Instansi Terkait dalam Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Maraknya Demonstrasi/Unjuk Rasa dan Kerusuhan Sosial;

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat. Isu Strategis harus menjadi perhatian serius Satpol PP Provinsi Banten yang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Berikut ini aspek strategis organisasi serta isu strategis yang sedang dihadapi, yaitu:

1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah
2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat optimal
4. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal
5. Pemilu dan Pemilihan Serentak di Tahun 2024

Sedangkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Satpol PP Provinsi Banten adalah:

1. Belum optimalnya aparatur Satpol PP (Jumlah personil, Kompetensi, PPNS, Pemadam Kebakaran)
2. Terbatasnya sumberdaya sarana dan prasarana pendukung (belum memiliki Gedung Perkantoran Satpol PP dan alat pengamanan PHH, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran)
3. Lemahnya koordinasi dengan OPD di Provinsi, kab/kota dan instansi vertika terkait
4. Lemahnya koordinasi di Provinsi dengan kab/kota di daerah perbatasan
5. Lemahnya peran dan fungsi Satgas Linmas dan Minimnya Pembinaan Satlinmas
6. Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Perda dan Perkada dan Satlinmas
7. Potensi rawan bencana kebakaran berubah atau dinamis

Pemetaan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.6. Pemetaan Permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum efektifnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masih kurangnya upaya penegakan Peraturan Perundang undangan	Belum optimalnya aparatur Satpol PP (Jumlah personil, Kompetensi, PPNS)
			Terbatasnya sumberdaya sarana dan prasarana pendukung (belum memiliki Gedung Perkantoran Satpol PP dan alat pengamanan PHH)
			Lemahnya koordinasi dengan OPD di Provinsi, ka/kota dan instansi vertika terkait
			Lemahnya koordinasi di Provinsi dengan kab/kota di daerah perbatasan
			Lemahnya peran dan fungsi Satgas Linmas dan Minimnya Pembinaan Satlinmas
			Belum optimalnya Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Perda dan Perkada dan Satlinmas
2	Belum efektifnya penanganan daerah rawan bencana	Belum optimalnya Pelayanan Bencana Kebakaran	Potensi rawan bencana kebakaran berubah atau dinamis
			Minimnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Minimnya Jumlah Personil Pemadam Kebakaran
			Minimnya Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Permasalahan tersebut diatas bila tidak ditanggulangi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian Visi Provinsi Banten secara umum.

Tidak bias dipungkiri bahwa kegiatan Pemilu tentunya membutuhkan situasi yang aman dan kondusif, oleh karena itu peran Satpol PP dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak sangatlah strategis agar kegiatan Pemilu dan Pemilihan Serentak bias berjalan dengan lancar.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPD Provinsi Banten. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Provinsi Banten terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Banten sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RPD Provinsi Banten untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Banten, Satuan Polisi Pamong Praja yang masih baru terbentuk berdasarkan Perda Nomor 83 Tahun 2016 membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Banten melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada awal penyusunan Rencana Kerja

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada 3 Program, 12 Kegiatan dan 44 Sub dari setiap Kegiatan dengan nilai pagu indikatif Rp. 44.919.569.000, namun seiring dengan berjalannya proses assistensi dan Verifikasi pada akhirnya dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan pagu indikatif menjadi Rp. 44.919.569.000 dengan adanya perubahan nilai pagu dari setiap Sub Kegiatan disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2023. Secara rinci Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

RENCANA KERJA (RENJIA) TAHUN 2023

Tabel. 2.7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					44.900.000.000				44.919.569.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Ketercapaian dan Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	35.872.604.000	Persentase Ketercapaian dan Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100 Persen	35.872.604.000		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	185.000.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	195.000.000		
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	4 Dokumen	50.000.000		
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	10.000.000		

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	10.000.000
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	10.000.000
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	10.000.000
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	80.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	12 Laporan	90.000.000
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	3 Laporan	15.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	21.238.847.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	21.497.114.341
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ Bulan	20.618.847.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Serang, Curug, Sukajaya	87 Orang/ Bulan	20.877.114.341
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	550.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Serang, Curug, Sukajaya	12 Dokumen	550.000.000

RENCANA KERJA (REJKA) TAHUN 2023

03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15,000,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	12 Dokumen	15,000,000
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	15,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	12 Dokumen	15,000,000
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Laporan	10,000,000
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10,000,000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	10,000,000
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	18 Laporan	10,000,000
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10,000,000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	10,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	125,000,000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	149,256,000
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	50,000,000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Serang, Curug, Sukajaya	2 Dokumen	50,000,000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang 80 Orang	75.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	0 Orang 80 Orang	99.256.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	825.000.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	775.000.000
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Paket	50.000.000
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Paket	75.000.000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	600.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	600.000.000
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Serang, Curug, Sukajaya	12 Dokumen	50.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.219.023.250	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	500.000.000
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.219.023.250	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	10 Unit	500.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	10.533.466.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	10.533.466.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	10.533.466.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	4 Laporan	10.533.466.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.488.000.409	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1.383.000.000
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	1.258.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Serang, Curug, Sukajaya	60 Unit	1.258.000.000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	75.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Serang, Curug, Sukajaya	100 Unit	75.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	155.000.409	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Unit	50.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi	100 Persen	6.352.396.000	cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi		100 Persen	7.270.000.000
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 Persen	4.802.396.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100 Persen	5.020.000.000
01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	272 Kasus	400.000.000	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	272 Kasus	500.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	228 Kasus	850.000.000	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	228 Kasus	1.000.000.000
03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0 Dokumen 1 Dokumen	125.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000
04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen 12 Dokumen	615.000.000	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen 12 Dokumen	1.800.000.000
05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	200.000.000	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Serang, Curug, Sukajaya	60 Orang	120.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	150.000.000
07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unit	2.481.146.000	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kota Serang, Curug, Sukajaya	4 Unit	1.000.000.000
08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	300.000.000
09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	31.250.000	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Serang, Curug, Sukajaya	12 Laporan	50.000.000
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 Persen	1.175.000.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		100 Persen	1.550.000.000
01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	400.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	450.000.000
02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	8 Laporan	525.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	700.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	2 Laporan	250.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	400.000.000
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	100 Persen	375.000.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		100 Persen	700.000.000
01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	3 Laporan	225.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Kota Serang, Curug, Sukajaya	3 Laporan	300.000.000
02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	7 Dokumen	150.000.000	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	400.000.000
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100 Persen	2.675.000.000	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran		100 Persen	2.675.000.000
	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100 Persen	2.450.000.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		100 Persen	2.625.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	150.000.000
02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	75.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	100.000.000
03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	0 Laporan 1 Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Serang, Curug, Sukajaya	0 Laporan 1 Laporan	150.000.000
04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	0 Dokumen 1 Dokumen	150.000.000
05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	1.450.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Kota Serang, Curug, Sukajaya	4 Unit	1.250.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	100.000.000
07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	75.000.000
08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	1 Unit	150.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Unit	200.000.000
09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	50 Orang	150.000.000	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Kota Serang, Curug, Sukajaya	50 Orang	150.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	100.000.000
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	1 Kabupaten	n/Kota 50,000,000	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Kabupaten	50,000,000
12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Dokumen	50.000.000
13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	a 75,000,000	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kota Serang, Curug, Sukajaya	50 Keluarga	a 100,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 Persen	225.000.000	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100 Persen	225.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Serang, Curug, Sukajaya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	150.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Serang, Curug, Sukajaya	1 Laporan	150.000.000
02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	75.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	100.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Review terhadap rancangan RKPD tidak terlepas dari mengakomodir aspirasi masyarakat baik langsung maupun melalui perwakilan DPRD dan lembaga-lembaga dari Kabupaten/Kota yang terkait dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena untuk suksesnya suatu program dan kegiatan harus didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Sehubungan hal tersebut, pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana kerja akhir ke beberapa usulan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

Selanjutnya program dan kegiatan masyarakat diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satpol PP Provinsi Banten melalui pelaksanaan kegiatan Forum OPD Satpol PP. Usulan-usulan program/kegiatan tersebut di evaluasi berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat dalam masyarakat dengan disinkronkan sesuai tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Banten, diantaranya isu strategis mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kemudian seluruh usulan program dan kegiatan program tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten untuk menyelaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

2.8. Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	KABUPATEN SERANG				
	Pengadaan Kendaraan Dalmas	Wil Kab Serang	Operasional Dalmas	1 Unit	
	Pengadaan Kendaraan Patwal	Wil Kab Serang	Operasi Patroli dan Keamanan	1 Unit	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

KOTA SERANG					
	Penyelenggaraan Tipiring	Kota Serang	Penanganan Trantibum	12 kali	
	Razia Pekat	Kota Serang	Penanganan Trantibum	12 kali	
	Penertiban PKL	Kota Serang (Pasar Lama dan Pasar Rawu)	Penanganan Trantibum	12 kali	
	Pengadaan Kapal Patroli Satpol PP	Kota Serang	Penanganan Trantibum	1 Unit	
	Pengadaan Jaket Satpol PP	Kota Serang	Penanganan Trantibum	211 Steel	
	Pengadaan Jaket Damkar	Kota Serang	Penanganan Damkar	76 Steel	
	Pelatihan Pemadam Kebakaran	Kota Serang	Penanganan Damkar	70 Orang	
KABUPATEN LEBAK					
	Pengadaan Kendaraan Dalmas	Rangkasbitung, Lebak	Penanganan Trantibum	1 Unit	
	Pengadaan Kendaraan Patwal	Rangkasbitung, Lebak	Penanganan Trantibum	1 Unit	
	Penegakkan Perda	Rangkasbitung, Lebak	Operasi Yustisi	60 B	
KABUPATEN PANDEGLANG					
	pembangunan POSKO penanganan trantibum di 5 zona Hut Pol PP tingkat Kabupaten	Kab. Pandeglang		4 Unit dengan kelengkapannya	
	Jambore Linmas	Kab. Pandeglang		1 Kegiatan	
	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemeliharaan Trantibum	Kab. Pandeglang		1 Unit	
	Pengadaan pakaian Dinas (PDH, PDL dan Satgas)	Kab. Pandeglang		200 steel	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Pandeglang		5 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 dalam RPJPN 2005-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dengan memperhatikan Visi ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (PN-1).
- b) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN-2).
- c) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3).
- d) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN-4).
- e) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN-5).
- f) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN-6).
- g) Memperkuat stabilitasi politik hukum keamanan dan transformasi pelayanan public (PN-7)

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Selanjutnya dalam rangka mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden, sesuai tugas dan fungsinya, dalam Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024 dinyatakan Tujuan dan Sasaran Strategis yaitu :

Tujuan Strategis

- 1) **Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).**
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Sasaran Strategis :

Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan Kementerian Dalam Negeri. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
- 5) Penghayatan, pengamalan, pbumian nilai-nilai ideologi pancasila.
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.
- 8) **Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.**

9) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja selain disusun untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan memperhatikan dan menyeleraskan dengan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian Visi Misi RPD Provinsi Banten 2023-2026 pada Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah:

1. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran

Untuk menjabarkan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan sasaran untuk dapat dijadikan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran pada Renstra Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan 2 : Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.

Sasaran 1 : Menurunnya tingkat kriminalitas dan meningkatnya ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan merupakan suatu bentuk komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan penyelarasan derap langkah mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Banten di Tahun 2023 - 2026.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Impact)	Target Capaian Setiap Tahun			
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70-80 Nilai	70-80 Nilai	70-80 Nilai	70-80 Nilai
2	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran.	Menurunnya tingkat kriminalitas dan ketertiban umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Rasio Penegakkan Perda dan Perkada	100	100	100	100
		Meningkatnya koordinasi penanganan bencana kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	100	100	100	100

Tujuan Satuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Untuk mewujudkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provsu TA. 2021 adalah:

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)
2. Inmendagri No. 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
3. Permasalahan dan isu – isu strategis menyangkut situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten untuk tahun 2023 menetapkan 3 program 12 Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
 - 2.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 2.2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - 2.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
 - 3.1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
 - 3.2. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Tabel 3.2.
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Satpol PP Provinsi Banten Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen		100 Persen
1	05	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen
1	05	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokume
1	05	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume
1	05	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume
1	05	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume
1	05	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan
1	05	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan
1	05	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen
1	05	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ Bulan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	87 Orang/ Bulan
1	05	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokum
1	05	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokume	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokum

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokume	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokum
1	05	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan
1	05	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume
1	05	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	18 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	18 Laporan
1	05	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume
1	05	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen
1	05	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokume

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	80 Orang
1	05	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen
1	05	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket
1	05	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket
1	05	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan
1	05	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokume	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokum
1	05	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Unit
1	05	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen
1	05	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan
1	05	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen
1	05	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	60 Unit
1	05	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Unit
1	05	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi	100 Persen		100 Persen
1	05	02	1,01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 Persen		100 Persen
1	05	02	1,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	272 Kasus	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	272 Kasus
1	05	02	1,01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	228 Kasus	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	228 Kasus

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05	02	1,01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0 Dokumen 1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokume 1 Dokume
1	05	02	1,01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen 12 Dokume	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokume 12 Dokum
1	05	02	1,01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	60 Orang
1	05	02	1,01	06	Kejira Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05	02	1,01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unit	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Unit
1	05	02	1,01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume
1	05	02	1,01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan
1	05	02	1,02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 Persen		100 Persen
1	05	02	1,02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan
1	05	02	1,02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	8 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	8 Laporan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05	02	1,02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	2 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Laporan
1	05	02	1,03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	100 Persen		100 Persen
1	05	02	1,03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	3 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan
1	05	02	1,03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	7 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Dokume
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100 Persen		100 Persen

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05	04	1,01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100 Persen		100 Persen
1	05	04	1,01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume
1	05	04	1,01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume
1	05	04	1,01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	0 Laporan 1 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Laporan 1 Laporan
1	05	04	1,01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0 Dokumen 1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokume 1 Dokume

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05	04	1,01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Unit
1	05	04	1,01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume
1	05	04	1,01	07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume
1	05	04	1,01	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	1 Unit	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05	04	1,01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	50 Orang	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	50 Orang
1	05	04	1,01	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0 Dokumen 1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokume 1 Dokume
1	05	04	1,01	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	1 Kabupate	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Kabupate
1	05	04	1,01	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1 Dokumen	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Target 2023	Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
1					2	3	4	5	6
1	05	04	1.01	13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarg	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	50 Keluarg
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 Persen		100 Persen
1	05	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan
1	05	04	1.02	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Banten, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Banten. Sejalan dengan Misi keempat Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2023 terdiri atas 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp.44.900.000,00. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		44.900.000.000			45.094.153.000				
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	35.872.604.000		100 Persen	36.595.928.000		
1	05	01	1,01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	185.000.000		100 Persen	195.000.000	
1	05	01	1,01	01	Penyusunan Perencanaan Daerah	Dokumen Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokume n 50,000,000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
			1	2	3	4	5
1 05 01 1,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	10.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume	n 10,000,000
1 05 01 1,01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	10.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume	n 10,000,000
1 05 01 1,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	10.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume	n 10,000,000
1 05 01 1,01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	10.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume	n 10,000,000
1 05 01 1,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	80.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	90.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
			1	2	3	4	5
1 05 01 1,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	15.000.000
1 05 01 1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	21.497.114.341		100 Persen	22.269.789.000
1 05 01 1,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ Bulan	20.877.114.341	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	87 Orang/ Bulan	21.649.789.000
1 05 01 1,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume	n 550,000,000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokum	en 550,000,000
1 05 01 1,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokume	n 15,000,000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokum	en 15,000,000
1 05 01 1,02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokume	n 15,000,000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokum	en 15,000,000
1 05 01 1,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	10.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 01 1,02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume	n 10.000.000
1 05 01 1,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keu Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	18 Laporan	10.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	18 Laporan	10.000.000
1 05 01 1,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume	n 10.000.000
1 05 01 1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	125.000.000		100 Persen	150.000.000
1 05 01 1,05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	50.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Dokume	n 50.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 01 1,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang 80 Orang	75.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Orang 80 Orang	100.000.000
1 05 01 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	825.000.000		100 Persen	900.000.000
1 05 01 1,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	50.000.000
1 05 01 1,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	100.000.000
1 05 01 1,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	600.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	700.000.000
1 05 01 1,06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	100.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	50.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 01 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.219.023.250		100 Persen	500.000.000
1 05 01 1,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.219.023.250	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	10 Unit	500.000.000
1 05 01 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	10.533.466.000		100 Persen	11.081.139.000
1 05 01 1,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	10.533.466.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Laporan	11.081.139.000
1 05 01 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.488.000.409		100 Persen	1.500.000.000
1 05 01 1,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	1.258.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	60 Unit	1.300.000.000
1 05 01 1,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	75.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	100 Unit	100.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
			1	2	3	4	5
1 05 01 1,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	155.000.409	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	100.000.000
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	cakupan pelayanan ketenteraman ketertiban umum daerah provinsi	100 Persen	6.352.396.000		100 Persen	6.100.000.000
1 05 02 1,01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 Persen	4.802.396.000		100 Persen	4.000.000.000
1 05 02 1,01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	272 Kasus	400.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	272 Kasus	500.000.000
1 05 02 1,01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	228 Kasus	850.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	228 Kasus	1.000.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0 Dokumen 1 Dokumen	125.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokumen 1 Dokumen	n 100.000.000 n
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen 12 Dokumen	615.000.000 n	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokumen 12 Dokumen	n 750.000.000 en
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	200.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	60 Orang	200.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 02 1,01 06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	100.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume	100,000,000 ⁿ
1 05 02 1,01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unit	2.431.146.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Unit	1.200.000.000
1 05 02 1,01 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	50.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume	50,000,000 ⁿ
1 05 02 1,01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	31.250.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	100.000.000
1 05 02 1,02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 Persen	1.175.000.000		100 Persen	1.500.000.000
1 05 02 1,02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	400.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	400.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 02 1,02 02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	8 Laporan	525.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	8 Laporan	700.000.000
1 05 02 1,02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	2 Laporan	250.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Laporan	400.000.000
1 05 02 1,03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	100 Persen	375.000.000		100 Persen	600.000.000
1 05 02 1,03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	3 Laporan	225.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	250.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	7 Dokumen	150.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	7 Dokume	n 350.000.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100 Persen	2.675.000.000		100 Persen	2.398.225.000
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100 Persen	2.450.000.000		100 Persen	2.198.225.000
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	100.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume	n 150.000.000
1.05.04.1.01.02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	75.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume	n 0

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	0 Laporan 1 Laporan	100.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Laporan 1 Laporan	150.000.000
1.05.04.1.01.04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	0 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokumen 1 Dokumen	150.000.000
1.05.04.1.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	1.450.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	4 Unit	1.000.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
			1	2	3	4	5
1.05.04.1.01.06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	1 Dokumen	50.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	100.000.000
1.05.04.1.01.07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	1 Dokumen	50.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	50.000.000
1.05.04.1.01.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai dengan Standar Teknis Terkait	1 Unit	150.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Unit	150.000.000
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	50 Orang	150.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	50 Orang	150.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif				
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	05	04	1,01	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokume 1 Dokume	n 100,000,000 n
1	05	04	1,01	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	1 Kabupate	n/Kota 50,000,000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Kabupate	n/Kota 48,225,000
1	05	04	1,01	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1 Dokumen	50.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokume	n 50,000,000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Prioritas Daerah	Target	Pagu ndikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1 05 04 1,01 13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarg	75.000.000 ^a	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	50 Keluarg	100.000.000 ^a
1 05 04 1,02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 Persen	225.000.000		100 Persen	200.000.000
1 05 04 1,02 01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	150.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	100.000.000
1 05 04 1,02 02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	75.000.000	4. Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	100.000.000

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan Pembangunan Tahunan Daerah pada umumnya. Renja PD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tahun 2023 ini didasarkan pada visi, misi, sasaran/target dan arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten tahun 2005-2025. Dalam Renja Satpol PP Provinsi Banten tahun 2023 ini juga telah ditetapkan target-target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun. Untuk itu diharapkan renja ini dapat dijadikan sebagai prioritas dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan terselenggaranya penegakan perda, perkada serta perlindungan masyarakat Provinsi Banten.

Serang, Juni 2022

Kasatpol PP Provinsi Banten



AGUS SUPRIYADI S.Sos. M.Si.
NIP. 19710805 199101 1001